

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MISKIN DI PEDESAAN MELALUI UKM

**(Studi Kasus di Desa Sukamaju, Kabupaten
Sukabumi, Jawa Barat, Indonesia)**

Rio F. Wilantara

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini, adalah (a) bagaimana pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat pedesaan (PNPM Mpd); (b) bagaimana dampak program pemberdayaan, terhadap usaha pemberantasan kemiskinan masyarakat pedesaan; (c) faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan program tersebut.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode studi kasus, dengan pendekatan kualitatif terhadap pelaksanaan PNPM Mpd di Desa Sukamaju Kabupaten Sukabumi. Adapun yang menjadi informan adalah tokoh-tokoh masyarakat, dan pelaku usaha objek sasaran. Sedangkan yang menjadi informan kunci, adalah pelaksana pemberdaya pada program tersebut dalam hal ini dinas terkait di tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa.

Hasil penelitian, adalah (a) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM Mpd) merupakan salah satu mekanisme program pemberdayaan masyarakat, dalam usaha mengembangkan usaha kecil dan menengah (UKM) dan pengurangan angka kemiskinan secara terpadu pada kawasan luar Bandar; (b) pelaksanaan bantuan pinjaman modal UKM di Desa Sukamaju, telah menunjukkan keadaan yang cukup berarti. Hal ini ditunjukkan dengan perkembangan modal yang cenderung meningkat dari tahun ke tahun, dan memberikan kenaikan pendapatan bagi kelompok sasaaran di Desa Sukamaju; (c) program yang dilaksanakan tidak terbebas dari berbagai faktor penghalang yang mengambil bagian dalam memberikan pengaruh terhadap pelaksanaan. Dalam pelaksanaan program PNPM Mpd di Desa Sukamaju, didapat beberapa faktor penghalang terutama kesadaran masyarakat. Sedangkan faktor eksternal terutama sokongan sumberdaya program yang disediakan oleh pemerintah baik dana, teknologi, maupun manusia (pendamping).

Kata Kunci: PNPM Ppd, pemberdayaan masyarakat, kemiskinan

Pendahuluan

Kemiskinan merupakan salah satu masalah utama dalam pembangunan di Indonesia. Kemiskinan juga menyebabkan masyarakat tidak mendapat pendidikan yang berkualitas, kesulitan untuk membiayai kesehatan, rendahnya tabungan, serta kurangnya jaminan sosial dan perlindungan bagi keluarga.

Lewis (1966) mengatakan bahwa kemiskinan adalah konsep yang mempunyai lima dimensi, yaitu: 1) kemiskinan, 2) ketidakmampuan, 3) kecemasan, 4) kergantungan, dan 5) keterasingan secara geografi mahupun sosiologis.

UKM (Usaha Kecil dan Menengah) dipandang mempunyai potensi untuk mengatasi kemiskinan serta untuk menghadapi krisis ekonomi laten di negara-negara berkembang. Hal itu terlihat dari sejarah bahwa kegiatan UKM di Indonesia dapat bertahan dan berkembang, bahkan menjadi penyelamat untuk pemulihan ekonomi pada masa berlaku krisis ekonomi dunia tahun 1998 (BPS, 2009). Namun walaupun begitu, posisi UKM dalam kegiatan ekonomi Indonesia masih meninggalkan berbagai persoalan. Dengan demikian UKM yang sudah berjalan selama ini ternyata belum mampu menjadi solusi kesejahteraan masyarakat secara luas. Keadaan tersebut terjadi karena disebabkan oleh masih rendahnya pendidikan dan pengalaman (*uneducated*) pelaku usaha UKM, kesulitan modal dan akses pengangkutan serta infrastruktur kawasan usahanya.

Program bantuan PNPM Mpd, adalah untuk mendorong pembangunan ekonomi masyarakat pedesaan dan meugurangi angka kemiskinan melalui usaha produktif sampai kawasan-kawasan terpencil dan terasing. Peneliti melakukan kajian tentang pelaksanaan PNPM Mpd di Desa Sukamaju Kabupaten Sukabumi, khususnya mengkaji apakah upaya pemberian bantuan pinjaman untuk modal usaha dan bantuan teknis lainnya, dapat membant masyarakat miskin untuk memperkuat ketahanan ekonomi keluarganya.

Maka dengan demikian, tujuan penelitian ini, adalah : (a) bagaimana pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat pedesaan (PNPM Mpd); (b) bagaimana dampak program pemberdayaan, terhadap usaha pemberantasan kemiskinan masyarakat pedesaan; (c) faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan program tersebut.

Kajian Pustaka

Kajian mengenai pengembangan UKM di Indonesia bahkan di negara-negara berkembang lainnya sudah sangat banyak. Salah satunya ialah kajian yang dilakukan oleh Organisasi Buruh Internasional/ILO yang (Sethuraman,1993). Pada kasus Indonesia awal tahun 90-an Chris Manning et al (1991), melakukan hal serupa. Kajiannya menjelaskan beberapa keadaan UKM di Indonesia pada masa itu, yaitu UKM tidak mempunyai sistem organisasi secara baik, tidak menggunakan institusi lokal, tidak mempunyai panduan perniagaan yang baik, tidak mempunyai skim kerja dalam kegiatan usaha, dan rendahnya sokongan pemerintah. Kemudian teridentifikasi, beberapa faktor penghambat diantaranya masalah pemasaran, keuangan, sumber manusia, bahan baku, teknologi dan infrastruktur.

Kajian yang dilakukan Tambunan (2003), menemukan bahwa UKM memiliki posisi penting dalam pembangunan ekonomi nasional kerana sumbangannya yang besar terhadap kesempatan kerja dan kenaikan pendapatan, khususnya di kawasan pedesaan. Selain itu, kajian itu juga menyebutkan bahwa UKM berdampak kepada kadar pertumbuhan yang tinggi di negara-negara Asia Timur dan Tenggara, *Newly Industrializing Countires* (NICs), seperti Korea Selatan, Singapura, dan Taiwan. Hal itu juga terjadi di beberapa negara di kawasan benua Afrika. Pertumbuhan UKM sangat penting untuk menaikkan *output agregat* dan kesempatan kerja. Hal itu sejalan dengan kajian yang dilakukan di Bangladesh oleh Sarder et al (1997),

Madajewicz (1999) yang melakukan kajian program yang dikeluarkan oleh *Grameen Bank* (GB), yaitu *Bangladesh Rural Advencement Committee* (BRAC) dan *Bangladesh Rural Development Board's* (BRDB). Kedua-duanya merupakan program pemberantasan kemiskinan untuk kaum miskin yang

berdampak positif terhadap produktivitas masyarakat dan pinjaman berkelompok memengaruhi kerjasama antar anggota kelompok masyarakat dengan masyarakat lainnya.

Di India kajian Burgess (2005) mendapati bahwa Bank Sentral India yang memerintahkan kepada setiap bank di India untuk menubuhkan empat unit di pedesaan yang diberi nama bank sosial. Kebijakan yang dilakukan dari tahun 1977 sampai tahun 1990, menurunkan tingkat kemiskinan di kawasan tersebut. Hal itu karena, melalui bank sosial itu prosuder pembiayaan usaha menjadi sangat mudah dan sederhana. Kajian oleh Zaidi (2008) di Srilangka, yang mengkaji hubungan antara pembinaan UKM oleh pemerintah melalui bantuan keuangan, kebijakan, keusahawanan dan hubungan sumber bahan mentah; dengan kinerja usaha.

Sedangkan kajian di Indonesia, antara lain dikemukakan oleh Budi Utami (2006) yang mengkaji pelaksanaan pemberian pinjaman modal Program Pengembangan Kecamatan (PPK) dalam meningkatkan pendapatan kelompok usahawan miskin di Kabupaten Pacitan, mendapati bahwa pelaksanaan pemberian pinjaman PPK berkaitan dengan meningkatnya ekonomi masyarakat miskin. Nuri Fitriawati (2008) dalam kajiannya, terdapat pelaksanaan pemberian bantuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM Mpd) dalam Meningkatkan Pendapatan Kelompok Miskin di Kecamatan Plupuh Kabupaten Sragen; menemukan bahwa, (1) Prosuder pemberian pinjaman PNPM Mpd, mencakup pembentukan kelompok masyarakat, pemberian pinjaman modal dan bayaran ansuran. (2) Pendapatan kelompok miskin selepas mendapat pinjaman dari PNPM Mpd mengalami peningkatan yang berbeda-beda. Sedangkan (3) faktor penghalang yang dihadapi dalam pelaksanaan PNPM Mpd, yaitu anggota masyarakat sedikit mengalami masalah dalam pembuatan proposal dalam memohon program. Sejalan dengan kajian terdahulu terhadap program pemberdayaan masyarakat dengan pola PNPM, kajian Mubarak (2009), menemukan bahwa penilaian pemberdayaan masyarakat pada program itu telah mengubah tingkat kesadaran masyarakat,

dan meningkatkan pemahaman mereka untuk ikut berperanan dalam pembangunan pada masyarakat.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode studi kasus, dengan pendekatan kualitatif terhadap pelaksanaan PNPM Mpd di Desa Sukamaju Kabupaten Sukabumi. Adapun yang menjadi informan adalah tokoh-tokoh masyarakat, dan pelaku usaha objek sasaran. Sedangkan yang menjadi informan kunci, adalah pelaksana pemberdaya pada program tersebut dalam hal ini dinas terkait di tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa.

Validasi data dilakukan melalui triangulasi pada sumber dan pendekatan dalam penghimpunan data. Adapun waktu penelitian dilaksanakannya pada rentang waktu 2010-2012.

Hasil Penelitian

a. Pelaksanaan Program PNPM Mpd

Rencana Pembangunan Jangka menengah Nasional (RPJMN) 2010-2015, menegaskan bahwa program jangka panjang untuk kesejahteraan masyarakat dan mempercepat pemberantasan kemiskinan dilakukan melalui, (1) kelompok bantuan perlindungan sosial berasaskan keluarga, (2) kelompok bantuan pemberdayaan masyarakat, (3) kelompok bantuan pemberdayaan usaha kecil dan menengah (UKM) serta (4) kelompok bantuan program murah untuk rakyat (RPJMN, 2010).

Kelompok bantuan pertama, mempunyai anggaran paling besar ialah program BLT. BLT merupakan subsidi untuk masyarakat miskin sebagai pengurangan kesan negatif dari kenaikan harga minyak. Persatuan Pemerintah Desa Kabupaten Sukabumi (PPDKS), menegaskan penolakannya terhadap perancangan program BLT ini. Mereka berpendapat bahwa program tersebut menyebabkan tingkat ketergantungan masyarakat kepada pemerintah dan menciptakan kemalasan bagi masyarakat. Selain pada itu, kemungkinan munculnya konflik diantara anggota masyarakat sangat tinggi.

Berita hal tersebut juga dibenarkan oleh aparat Desa Sukamaju, yang juga merupakan anggota dari komunitas PPDKS, yang mengatakan bahwa program BLT juga menjadi beban bagi aparat desa.

"Mereka (anggota masyarakat) yang tidak mendapat BLT menuduh pejabat desa sebagai penyebar bantuan tidak adil, hal itu berkesan negatif kepada kami, pada hal data penentuan sasaran dikeluarkan oleh Pejabat Kabupaten (Sukabumi) dan BPS (Badan Pusat Statistik), bukan oleh kami, tentu ini sangat merugikan kami".

(wawancara, 04/05/2010)

Sedangkan pada kelompok bantuan yang kedua dan ketiga, yaitu bantuan pemberdayaan masyarakat dan bantuan pemberdayaan UKM, merupakan langkah lanjutan dari pada kelompok bantuan satu untuk melepaskan kebergantungan masyarakat kepada pemerintah. Kegiatannya dilaksanakan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR). Bantuan ini diarahkan untuk membantu pelaku UKM anggota masyarakat, di pedesaan. Pemberdayaan anggota masyarakat lebih diarahkan kepada peningkatan kapasitas teknis dan pembangunan sarana dan infrastruktur pedesaan, serta memberikan bimbingan dan bantuan pinjaman modal untuk pengembangan UKM anggota masyarakat.

Desa Sukamaju melaksanakan program-program pada tahap kelompok bantuan pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan UKM, melalui program PNPM Mpd. Pada data desa tahun 2010, PNPM Mpd merupakan program bantuan pengembangan masyarakat yang masa pelaksanaannya paling lama dari program-program lainnya yang pernah dilaksanakan di Desa Sukamaju. Pengelolaan program bantuan di Desa Sukamaju dilakukan oleh Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Sukamaju. BKM merupakan badan atau institusi dengan anggota masyarakat (*civil society organization*) di dalamnya.

Program pembangunan masyarakat yang dilaksanakan di Desa Sukamaju belum mampu memenuhi keinginan masyarakat. Pelibatan masyarakat masih sangat terbatas, keterlibatannya lebih didasari oleh harapan untuk mendapatkan bantuan. Akibatnya, penyertaan masyarakat

perlahan-lahan menurun sehingga akhirnya tidak tampak, seiring dengan telah terpenuhinya harapan jangka pendek mereka. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM Mpd) di desa Sukamaju, diarahkan untuk mampu menjalankan beberapa prinsip seperti (1) pemberdayaan, (2) penyertaan, (3) kebebasan, (4) pengembangan UKM, (5) kemampuan, (6) sumbangan kepada keluarga dan (7) usaha membasmi kemiskinan.

Sumber keuangan program diperoleh dari anggaran tahunan (APBN dan APBD). Semasa periode penelitian, sumber keuangan program diberikan dan diuruskan kepada UPK untuk program Bantuan Langsung Masyarakat (BLM), dan untuk program bantuan pinjaman modal dalam pengembangan UKM kelompok masyarakat. Program BLM ini digunakan juga untuk kegiatan pembangunan sarana dan infrastruktur desa, kegiatan usaha ekonomi produktif (UEP), kegiatan pendidikan dan kegiatan kesihatan.

Proses pemberian bantuan tidak diberikan kepada individu, tetapi kepada kelompok. Pembentukan kelompok ditentukan oleh anggota masyarakat sendiri berdasarkan sasaran program dalam forum musyawarah. Jumlah anggota pada setiap-tiap kelompok minimum lima orang.

b. Dampak Program Pemberdayaan terhadap Perluasan Kesempatan Kerja

Salah satu kasus dukungan program untuk usaha masyarakat antara lain, sebagaimana diterima oleh kelompok Balabu (Lelaki), kelompok ini dimulai tahun 2009 dengan anggota sebanyak 10 orang. Pada awalnya usaha ini hanya pada penjualan kayu kawasan Desa Sukamaju ke kawasan lainnya, dan pembuatan perabot sederhana saja untuk keperluan beberapa masyarakat Desa Sukamaju yang memerlukan. Setelah mendapatkan bantuan program, usahanya sudah bisa memproduksi meja dan kursi, tempat tidur, meja televisi dan lain-lain. Sampai kini pinjaman kepada UPK sudah 2 kali sebesar Rp. 1.250.000 per orang, dengan total sebesar Rp. 25.000.000.

Selain mengelola kayu sebagai industri produktif, masyarakat Sukamaju pun memanfaatkan tanah menjadi sumber usaha mereka. Tanah

merah yang merupakan tanah yang banyak ditemukan di Desa Sukamaju, menjadi bahan utama untuk memproduksi bata (*brick*). Usaha ini digalakkan oleh kelompok Tasikmalaya yang anggotanya sebanyak 9 orang. Dalam satu bulan kelompok ini dapat menghasilkan 1000-1500 buah bata. Batu bata ini dipasarkan ke kota Sukabumi, Cisaat, Cianjur dan Bogor melalui jasa para tengkulak batu bata.

Salah saeorang anggota kelompok ini, yakni Nandang, mengatakan bahwa melalui bantuan PNPM Mpd, kelompoknya dapat meningkatkan kuantas produknya.

“Usaha saya ini sudah dua tahun dan bantuan pinjaman modal dari PNPM ini sangat membantu. Dengan bantuan ini saya dapat meningkatkan hasil produksi dua kali ganda dalam satu bulan”.

(wawancara Nandang, 15/06/2010)

Selain dari itu, PNPM Mpd juga menyebabkan kenaikan jumlah pelaku usaha mikro. Sebelum pelaksanaan program, anggota masyarakat yang bergerak pada sektor tersebut hanya sebanyak 4,1 persen dari jumlah angkatan kerja. Pada masa pelaksanaan program dari pada tahun 2008 sampai dengan 2010, terdapat kenaikan menjadi rata-rata 5,4 persen setahunnya. Jenis-jenis kegiatan UKM di Desa Sukamaju melalui program PNPM MPd sampai dengan tahun 2010, terlihat dalam table 1.

Tabel 1

Jenis Usaha Kecil Masyarakat Program PNPM Pmd

No	Jenis Usaha	Jumlah Pelaku Usaha
1	Makanan dan Minuman	15
2	Minuman	8
3	Bahan Bau Makanan	18
4	Pengrajin Kayu	7
5	Pengrajin Batu Bata	4
6	Penggilingan Padi	7

7	Perikanan	5
8	Perkebunan Buah dan Sayur	23
9	Pengolahan Halia dan Pisang	8
10	Elektronik	3
11	Bengkel	2
12	Lain-lain	7
Total		107

Sumber: Data Desa Sukamaju dan olahan peneliti, 2010.

Usaha penjualan makanan dan minuman lebih banyak dilakukan oleh pelaku usaha perempuan, melalui program SPP PNPM. Adapun kegiatan usaha kumpulan perempuan lainnya ialah pengolahan pisang, pengolahan halia, perkebunan buah dan sayuran, kedai elektronik, perikanan dan lainnya. Kegiatan-kegiatan usaha tersebut menjadi sumber pendapatan tambahan untuk mereka. Walaupun dipandang cukup kecil, hal tersebut tidak menjadi halangan bagi para kumpulan perempuan untuk melakukan usaha, kerana usaha ini hanya memerlukan modal yang tidak besar, dan kemahiran yang tidak terlalu sulit untuk dilakukan.

Salah satu kelompok lainnya, yaitu kelompok Ammarosa (perempuan) yang mempunyai usaha pengolahan pisang, membuat suatu produk makanan yang dibuat dari buah pisang iaitu Sale Pisang. Kelompok Ammarosa ini dikembangkan sejak tahun 2009 dengan anggota sebanyak 10 orang. Pada awalnya, usaha ini hanya membuat cip ubi kayu dan pisang tetapi sekarang berkembang dengan memproduksi sale pisang. Sampai dengan kini pinjaman kelompok Ammarosa kepada UPK baru sebanyak 1 kali dengan total pinjaman Rp 1.500.000 per orang yang totalnya mencapai sebesar Rp. 15.000.000.

Selain pengolahan pisang, kelompok perempuan juga berjaya menghasilkan produk pengolahan dari Halia. Produk ini diproduksi oleh beberapa anggota dari kelompok Rosela, salah satunya ialah Puan Yayah yang merupakan bahagian dari bimbingan UPK Desa Sukamaju, kelompok Rosela dikembangkan sejak tahun 2008 oleh 10 anggota. Pada awalnya, dalam 1 kali panen mendapatkan Halia sebanyak 215 Kg, kini usahanya sudah

meliputi produksi minuman Halia dan akan dikembangkan lagi kepada produk olahan Halia lainnya seperti minuman Bandrek¹ dan Kopi Halia. Sampai kini, pinjaman kepada UPK sudah sebanyak 3 kali dengan total pinjaman sebesar Rp. 5.250.000.

1. Sumbangan Terhadap Ekonomi Keluarga

Pemberian bantuan pinjaman modal untuk mengembangkan UKM, merupakan usaha untuk meningkatkan pendapatan para pelaku UKM, sehingga ekonomi keluarga terangkat. Pelaksanaan program tersebut memunculkan banyak kegiatan UKM, diantaranya perniagaan pakaian, pemakanan, bahan baku dan usaha lain yang dikembangkan dalam rumah tangga. Dengan pinjaman modal tersebut, beberapa kelompok masyarakat memanfaatkan untuk pembiayaan membuka usaha baru.

Salah satu masyarakat yang mendapatkan bantuan adalah ibu Nani Nur dari kelompok Kamboja, Puan Nani menyertai kelompok tersebut dari tahun 2008 sampai tahun 2010. Usaha yang dijalankan Puan Nani, yaitu kedai makanan. Idea menubuhkan kedai makanan ini muncul dari suaminya, yang bekerja sebagai petani di ladang dekat rumahnya. Kedai sederhana yang di urus oleh ibu Nani, dengan bantuan PNPM Mpd sebesar Rp 1.500.000; dapat menyebabkan keluarga ini memperoleh tambahan penghasilannya sebagai keluarga petani.

Hasil usaha kedai makan dapat menghidupi keluarganya. Dalam sebulan keluarga ini mendapatkan tambahan penghasilan Rp. 400.000 sampai Rp. 425.000, atau meningkat 21,4 persen dibanding sebelumnya. Mereka telah mampu dapat mengubahsui rumah dan membiayai sekolah anaknya,. Dalam wawancara dengan ibu Nani, menyampaikan hal tersebut:

“Kerena program ini, saya mempunyai kegiatan baru yaitu mengurus kedai kecil di depan rumah manakala suami saya pergi bertani. Daripada saya berdiam diri dan tak ada pendapatan, saya coba buka kedai dan Alhamdulillah ada sedikit pendapatan untuk menambah kebutuhan hari-hari”

¹ Bandrek: Merupakan minuman khas Suku Sunda, mencampurkan Halia dengan air gula.

(Wawancara ibu Nani, 12/05/2010)

Pengalam hampir serupa juga dialami oleh seorang anggota kelompok sasaran yakni ibu Yayah, *“Sebelum ada pinjaman ini, usaha saya sedikit kurang baik, bersyukur dapat pinjaman dari PNPM, pinjaman uang itu saya pakai untuk mengembangkan usaha dan itu sangat membantu”*.

Dengan menggunakan teknik *Snowball Sampling* kepada beberapa pelaku usaha dari beberapa kelompok masyarakat yang mengikuti program, diperoleh adanya gejala peningkatan modal usaha sebelum dan selepas diberikan pinjaman. Setelah mendapatkan bantuan, modal usaha menjadi meningkat yaitu sebesar antara 80-148,9 persen.

2. Sumbangan Terhadap Pengurangan Angka Kemiskinan

Pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat miskin melalui pengembangan UKM oleh PNPM Mpd di Desa Sukamaju, telah berkesan meningkatkan pendapatan keluarga miskin. Tahun 2010 ada sekitar 11 usaha baru maupun usaha lama yang dibantu oleh program PNPM Mpd. Selain itu, program PNPM Mpd juga berkesan kepada peningkatan penyertaan kelompok perempuan, yang sebelumnya tidak mempunyai kegiatan maupun usaha, kini mereka mempunyai usaha untuk meningkatkan pendapatan dan membantu menurunkan angka kemiskinan keluarga. Ketidakadilan jender dalam masyarakat telah banyak merugikan kelompok perempuan. Pembangunan di pedesaan kurang mengikutsertakan perempuan dalam setiap program bantuan yang dibuat. Kemiskinan kepada kelompok perempuan terjadi kerana mereka tidak diberikan kesempatan untuk bekerja dan memperoleh pendapatan.

Menurut data bancian BPS, kawasan Desa Sukamaju termasuk kedalam kawasan kemiskinan absolut, dengan kemiskinan sebesar 78,2 persen dengan pendapatan kurang dari Rp 20.000 (\$2) per hari (BPS, 2008). Desa Sukamaju menurut data UPK PNPM Desa Sukamaju tahun 2010, mengalami penurunan angka kemiskinan sebesar 0,8 pesen Walaupun beberapa pihak meragukan data tersebut, karena bagi sementara ini pihak

penurunan angka kemiskinan bisa jga disebabkan oleh dana kiriman anggota keluarga yang bekerja di luar negeri (TKI) dan bukan semata karena program.

Kenaikan nominal pendapatan masyarakat miskin pun juga tidak berari banyak terhadap daya beli, karena adanya inflasi. Pendapat dari perangkat desa tentang hal tersebut, sebagaimana terungkap dalam wawancara,

“Kenaikan harga bahan utama makanan yang terus menerus, membuat pendapatan tambahan tidak terasa, walaupun memang pendapatan naik, tetapi seringkali susah untuk membeli bahan makanan seperti minyak kelapa, gula dan bahan makanan lainnya, selain itu beban hidup lain untuk pengobatan juga mengurangi jatah untuk keperluan lainnya”

(wawancara, 03/02/2010)

Sedangkan salah seorang tokoh masyarakat Desa Sukamaju berpendapat bahwa kenaikan pendapatan pelaku UKM kelompok miskin dapat dilakukan melalui program ini. Dukungan usaha tambahan keluarga akan semakin menaikkan daya beli dan tentunya mensejahterakan masyarakat. Hal itu dipaparkan dalam wawancara ini;

“Program ini mempunyai banyak manfaat positif nya, desa menjadi semakin berkembang dengan munculnya usaha-usaha baru, walaupun (usaha) kecil tapi sangat penting (bagi keluarga miskin). Sedikit demi sedikit usaha yang ada semakin berfaedah dan mengubah kehidupan masyarakat (miskin), apabila program ini dikembangkan, seperti nya semakin sejahtera dan mungkin mereka tidak akan miskin dan kekurangan lagi”.

(Wawancara, dengan tokoh masyarakat, 03/02/2010)

c. Faktor Penghambat Pelaksanaan Program

Program PNPM Mpd di Desa Sukamaju tidak terbebas dari berbagai faktor-faktor yang menghambat terhadap pelaksanaannya. Faktor-faktor tersebut dalam pelaksanaan program terdiri dari 2 (dua) bagian yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Dalam pelaksanaan program PNPM Mpd di Desa Sukamaju, di dapati beberapa penghambat yang dihadapi. Penghambat tersebut muncul dari berbagai unsur, yaitu dari anggota masyarakat, pengurus program, pihak pemerintah.

1. Faktor Internal

Rendahnya pemahaman masyarakat mengenai tujuan program PNPM

menjadi penyebab utama rendahnya kesadaran dan tanggung jawab masyarakat terhadap keberlangsungan program. Kehadiran warga dalam pertemuan-pertemuan PNPM yang dilakukan selama ini, tidak sepenuhnya mampu mengubah cara pandang dan kesadaran warga. Hal ini akibat pola komunikasi yang dikembangkan dalam pertemuan-pertemuan tersebut. Kondisi demikian terjadi akibat sikap aparat desa yang masih menempatkan diri sebagai pihak yang lebih superior daripada masyarakat yang lain. Aparat bicara dengan menggunakan bahasa formal program tetapi tidak menggunakan bahasa masyarakat yang mudah difahami.

Hal tersebut mengakibatkan tidak adanya kesetaraan antara kelompok elite desa dengan masyarakat dalam proses internalisasi program. Sebagian warga, terutama kaum miskin, bahkan tidak mau hadir dalam pertemuan semacam itu karena merasa asing. Hal itu tersirat melalui seorang masyarakat yang baru sekali mengikuti sosialisasi program ini: *"Kami tak paham dengan yang dibahas, kami juga tak mau tahu tentang persyaratan, jadi kami serahkan semuanya kepada yang lebih pintar dan lebih mengerti, kalau kami hanya ingin langsung dapat manfaatnya"*.

Kesadaran yang rendah, akibat miskomunikasi tersebut, berimplikasi kepada ketidaktarikan masyarakat kepada program ini, sehingga sebagian masyarakat tidak mau meninggalkan pekerjaan ketika berbenturan waktu dengan pelaksanaan pertemuan. Selain pada itu, lokasi pertemuan yang dilaksanakan tidak dapat diakses oleh semua masyarakat karena geografis Desa Sukamaju tidak mudah dijangkau dan biaya transportasi mahal. Perlunya proses penyadaran terus-menerus kepada masyarakat melalui komunikasi yang intensif dan persuasif, agar masyarakat bisa memahami bahwa pada sebagian proses perencanaan penganggaran publik yang ada di desa/daerah, terselip sebagian hak mereka yang harus sampai ke tangan yang benar. Karena anggaran adalah bagian dari hak umat yang mesti disampaikan ke jalan yang benar, dan tak boleh diambil tanpa kebutuhan yang tepat.

Sehubungan dengan itu meningkatkan kesadaran masyarakat perlu dilakukan dengan membuka komunikasi secara berjenjang. Dari tingkat RT/RW atau menggunakan momen-momen dalam masyarakat seperti pengajian, arisan dan hajatan.

2. Faktor Eksternal

Faktor penting dalam dimensi eksternal, yang menjadi penghambat adalah rendahnya sokongan sumberdaya program. Rendahnya daya sokong sumberdaya program antara lain keterbatasan jumlah dan kompetensi tenaga pembimbing yang memiliki kemahiran teknikal dan kemahiran komunikasi interpersonal. Tenaga pembimbing program yang diharapkan oleh masyarakat adalah pakara tau ahli yang mempunyai kemampuan dalam menguasai masalah-masalah pengembangan dan peluang UKM. Ambil contoh, pembimbing mesti memberikan pendapat mengenai jenis usaha yang seharusnya dikembangkan oleh masyarakat, kemudian langkah-langkah yang harus mereka lakukan agar usaha mereka dapat berjaya, dan alat kerja yang harus disediakan. Untuk program pembangunan sarana dan infrastruktur, lazimnya masyarakat mempunyai kepuasan yang berarti.

Harapan masyarakat untuk masalah tersebut, adalah pendamping atau pembimbing mestinya mempunyai pengalaman serta sistem pelatihan yang berkualitas, terutama dalam kemampuan merancang dan mengembangkan UKM, dan penguasaan teknologi yang sesuai. Secara personal, pendamping atau pembimbing perlu mewujudkan hubungan yang baik dan menyenangkan bagi kelompok sasaran.

Kesimpulan

1. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM Mpd) merupakan salah satu mekanisme program pemberdayaan masyarakat, dalam usaha mengembangkan usaha kecil dan menengah (UKM) dan pembasmian kemiskinan secara terpadu pada kawasan luar bandar.

2. Pelaksanaan bantuan pinjaman modal UKM di Desa Sukamaju, telah menunjukkan keadaan yang cukup berarti. Hal ini ditunjukkan dengan perkembangan modal yang cenderung meningkat dari tahun ke tahun, dan memberikan kenaikan pendapatan bagi usahawan Desa Sukamaju. Terlihat bahwa sebelum mendapatkan bantuan, pendapatan pelaku UKM sangat rendah, setelah menerima bantuan pendapatan pelaku UKM mengalami peningkatan yang berbeza-beza. Selain itu, program PNPM juga berkesan kepada penurunan kemiskinan masyarakat Desa Sukamaju, walaupun penurunannya masih sangat kecil.
3. Program yang dilaksanakan tidak terbebas dari berbagai faktor penghalang yang mengambil bagian dalam memberikan pengaruh terhadap pelaksanaan. Dalam pelaksanaan program PNPM Mpd di Desa Sukamaju, didapat beberapa faktor penghalang terutama kesadaran masyarakat. Sedangkan faktor eksternal terutama sokongan sumberdaya program yang disediakan oleh pemerintah baik dana, teknologi, maupun manusia (pendamping).

Daftar Pustaka

- Adelman, M. and C. Morris., (1973), *Economic Growth and Social Equity in Developing Countries*, Stanford, California: Stanford University Press.
- Agustino, Leo, (2008). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta CV.
- Alesina A. and D. Rodrik., (1994). *Distributive politics and economic growth*. Quarterly Journal of Economics, 465- 490.
- Bachruddin, Zaenal, Mudrajad Kuncoro, Budi Prasetyo Widyobroto, Tridjoko WismMurti, Zuprizal, Ismoyo. (1996). *Kajian Pengembangan Pola Industri Pedesaan Melalui Koperasi dan Usaha Kecil*. LPM UGM dan Balitbang DepartemKoperasi& PPK, Yogyakarta.
- Banerjee and Newman, (1993). *Occupational Choice and the Process of Development*. [Journal of Political Economy](#), 1993, vol. 101, issue 2, pages 274-98
- Blaxall, John (2000), *Governance and Poverty, Paper presented at the Joint Workshop on Poverty Reduction Strategies in Mongolia*, The World Bank, Ulan Bator, Mongolia, October 4 to 6.
- Carrol, (1979). *The Evolution of Civilizations*. New York: Macmillan, 1961; Indianapolis: Liberty Press.
- Harrold Laswell dan Abraham Kaplan, (1970). *Power and Society: A Framework for Political Inquiry*. 1656.
- Kakwani, N. and Son, H. (2003) *Poverty Equivalent Growth Rate*, Paper Prepared for the WIDER conference on 'Well-Being', WIDER, Helsinki
- Kartasmita, Ginanjar., (1996). *Pembangunan untuk Rakyat Memadukan Pertumbuhan Dan Pemerataan*. Jakarta: Cidesindo.
- Kartasmita, Ginanjar., (1997). *Administrasi Pembangunan; Perkmbangan Pemikiran dan Praktiknya di Indonesia*. LP3ES. Jakarta.
- Koswara, E.,(2000), *Menyongsong Pelaksanaan Otonomi Daerah Berdasarkan UU No 22 Tahun 1999*. Suatu Telaah menyangkut Kebijaksanaan dan Kompleksitasnya. Analisis CSIS No.1. Jakarta.

- Manning, Chris dan Noer Effendi, Tadjuddin, (1996). Urbanisasi, Pengangguran, dan Sektor Informal di Kota, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Marihot P. Siahaan, (2006), Pajak Daerah & Retribusi Daerah, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Mark Turner & David Hulme, (1997). Decentralization Within The State; Good Theory Poor Practice.
- Martin Khor, (2002). Globalisasi Perangkap Negara-Negara Selatan, Cindelas Pustaka Rakyat Cerdas, Yogyakarta, 2002.
- Marhaeni. (2009). Ilmu Komunikasi: Teori dan Praktik. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Putnam, R.D., (1993). *Making Democracy Work, Civic Traditions in Modern Italy*, Princeton University Press, New Jersey
- Rio F. Wilantara (2012), Pemberantasan Kemiskinan Melalui UMKM di Pedesaan Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat-Indonesia. Tesis Magister di University of Malaya Kualumpur.
- (2011) Pemberdayaan Masyarakat. Artikel di HU Pikiran Rakyat, Bandung.
- Sethuraman, S.V. (1981). *The urban informal sector in developing countries: Employment, poverty and environment*, ILO, Geneva
- Sethurahman, (1998). *Gender, Informality and Poverty: A Global Review Gender bias in female informal employment and incomes in developing countries*
- Schumpeter, Joseph A., (1991). *The economics and sociology of capitalism*. Princeton, New Jersey: Princeton University Press
- Schumpeter, J.A. 1934., (2008), *The Theory of Economic Development: An Inquiry into Profit s, Capital, Credit, Interest and the Business Cycle, translated from the German by Redvers Opie*, New Brunswick (U.S.A) and London (U.K.): Transaction Publishers..
- Stiglitz, Joseph., (1998a), *An Agenda for Development in the Twenty-First Century*, in *Annual World Bank Conference on Development Economics 1997*, J.E. Stiglitz and B. Pleskovic (eds.), The World Bank.
- Suharto, Edi (2002a), *Profiles and Dynamics of the Urban Informal Sector: A Study of Pedagang Kakilima in Bandung*, PhD thesis, Palmerston North: Massey University.
- (2002a), *Human Development and The Urban Informal Sector in Bandung: The Poverty Issue*, International Journal, New Zealand Journal of Asian Studies, December special edition.
- Sumodiningrat, Gunawan., (1998). Membangun Perekonomian Rakyat. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Susenas, (2011). *National Socio-Economic Survey 2011 Quarter 1*. Socio-Economic/Monitoring Survey.
- Deputi Bidang Pengkajian Sumberdaya UKMK. (2010). *Operational Guidance Blue Print of One Village One Product*, Jakarta.
- Oscar Lewis, (1966). *The Culture of Poverty*. Scientific American. Culture and Poverty.
- World Bank (1992), *Governance and Development*, The World Bank, Washington, DC
- Zimmerer, Thomas dan Norman M. Scarborough, (2005). Pengantar Kewirausahaan dan Manajemen Bisnis Kecil. Penerbit PT. Prenhallindo, Jakarta.

Perundang-undangan :

- Undang-Undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
- Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pemberdayaan dan Pengembangan KUMKM.
- Inpres Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembangunan yang Berkeadilan.
- Rencana Pembangunan Jangka menengah Nasional (RPJMN) 2010-2015,